



ISSN: 2746-4660

E-ISSN:

# FORMULASI PROGRAM DANA BERGULIR SAMISAKE DI KOTA BENGKULU

DEMPO XLER<sup>1</sup>SUGENG SUHARTO<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,  
University of Bengkulu

<sup>2</sup>) Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science,  
University of Bengkulu

<sup>1</sup> E-mail: [dempoxler@gmail.com](mailto:dempoxler@gmail.com) <sup>2</sup> E-mail: [sugengsuharto@unib.ac.id](mailto:sugengsuharto@unib.ac.id)

## ARTICLE HISTORY

Received: July 03, 21

Revised: August 05, 21

Accepted: August 08, 21

Available online: September 23, 21

## KEYWORDS

*Formulation, Program Revolving Fund, Samisake.*

## ABSTRAK

Ada dua penelitian dalam penelitian ini; perumusan kebijakan, dan interaksi pelaku kebijakan dalam keseluruhan proses perumusan program dana bergulir samisake di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus serta metode analisis datanya adalah "model analisis aliran". Hasil penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan cukup tinggi, terutama dalam proses mendorong percepatan isu-isu kebijakan menjadi agenda kebijakan yang mereka audiensi. Pemilihan alternatif kebijakan block grant merupakan arena politik di mana banyak aktor kebijakan saling tawar menawar. Di arena, berbagai kepentingan ikut mewarnai kebijakan, sehingga dalam proses pemilihannya banyak terjadi konflik dan tawar menawar antar aktor. Kemudian, akhirnya mereka mengkompromikan alternatif block grant untuk program dana bergulir samisake. Dalam proses pengambilan kebijakan, mereka mengakui bahwa program dana bergulir sama. Terdapat interaksi yang kompleks antar aktor kebijakan dalam keseluruhan proses perumusan program samisake program dana bergulir. Mereka adalah pimpinan Pemerintahan/eksekutif, LSM, kepentingan publik dan publik pemerintahan, dan akademik. Dalam interaksi tersebut, masing-masing aktor berusaha mempengaruhi alternatif yang dipilih melalui situasi konflik dalam penentuan samisake program dana bergulir di Kota Bengkulu.

This is an open access article under the  
CC-BY-SA license



**ABSTRACT**

There are two studies in this research; policy formulation, and interactions policy actors in the whole process of formulation revolving fund program samisake in the Bengkulu City. The research method is a qualitative through case study approach as well as data analysis method is "flow analysis model". Result of the research found that people participation in the policy formulation process fairly high, especially in process of pushing acceleration policy issues to be policy agenda by which they audience. Choosing the policy alternatives of block grant is political arena in which many policy actors bargain each other. In the arena, varieties of interests played to coloring the policy, therefore, in the choosing process there are many conflicts as well as bargains between the actors. Then, finally they compromise the alternative of block grant for revolving fund program samisake. In the policy adopting process, they recognized that the revolving fund program samisake. There are complex interactions between the policy actors in the whole process of formulation of revolving fund program samisake showing. They are chiefs of the Government/executive, NGOs, public interest and rural public, and collage academically. In the interactions, each actors try to influenced the alternative chosen through conflict situation in the determination of revolving fund program samisake in the Bengkulu City.

## PENDAHULUAN

Krisis Ekonomi Tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23% dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 Juta (17,47%) pada Tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Bengkulu juga tidak kalah progresif dalam gerakan penanggulangan kemiskinan, wujudnya adalah Program Samisake.

Program Samisake ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu, dimana dalam Peraturan daerah tersebut menetapkan pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilaksanakan oleh UPTD pada Dinas, UPTD tersebut berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan dalam pengelolaan Dana Bergulir Samisake bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap kelurahan.

Kemudian terkait dengan realisasi Perda tersebut diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Adapun yang menjadi Visi Samisake Kota Bengkulu yaitu; “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bengkulu melalui Peningkatan Pendapatan yang Berkeadilan Sosial”. Sedangkan Misi Samisake Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan 50.000 lapangan kerja.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas masyarakat sasaran program.
3. Penganekaragaman sumber penghasilan berdasarkan potensi dasar masyarakat.
4. Mengembangkan lembaga keuangan Mikro berbasis masyarakat.
5. Menstimulasi modal berusaha bagi masyarakat potensial.

Sumber: <http://www.bengkulukota.go.id/> (diakses pada 20 Februari, 2016)

Dalam kerangka penelitian ini, penulis mengasumsikan bahwa proses dalam perumusan Program Samisake ini terdapat dalam dua tahapan, yaitu proses perumusan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu oleh Tim Penyusun (Eksekutif) dan Keterlibatan (partisipasi) masyarakat, aktor, dan stakeholders pada proses negosiasi dan formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu. Apabila dirinci fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu oleh Tim Penyusun (Eksekutif).

Pada tahap ini proses perumusan kebijakan yang dikaji menyangkut pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem pengambilan kebijakan di tingkat legislatif. Aspek yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Masalah Kebijakan terkait dengan dalam proses formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.
- b. Isu Kebijakan dan Agenda Kebijakan dalam proses formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.
- c. Pemilihan alternatif kebijakan dalam proses formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.
- d. Penetapan Kebijakan dalam proses formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.

2. Keterlibatan (partisipasi) masyarakat, aktor, dan stakeholders pada proses negosiasi dan formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.

Batasan keterlibatan masyarakat, aktor, dan stakeholders disini adalah suatu bentuk tindakan menyokong, sumbangan, atau partisipasi yang diberikan dalam suatu proses perumusan kebijakan. Adapun aspek-aspek yang dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam rapat atau diskusi yang diadakan sehubungan dengan permasalahan yang ada.
- b. Sumbangan berupa ide-ide dan saran masyarakat dalam proses negosiasi dan formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.

c. Aktor kebijakan yang perannya dalam formulasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang masalah di muka, maka untuk penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana proses formulasi kebijakan publik Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu dilakukan?”.

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses formulasi kebijakan publik Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu, khususnya menyangkut aktor dan konflik yang terjadi dalam proses formulasi kebijakan publik tersebut.

Secara akademis hasil dari penelitian ini sebagai tambahan literature bagi dunia pendidikan dibidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya mengenai analisis formulasi Kebijakan Samisake, selain itu juga sebagai kontribusi pemikiran bagi perbaikan pada penelitian selanjutnya terkait kajian serupa.

Kemudian secara praktis, semoga menjadi input yang berguna bagi semua pihak, terutama dapat membuka cakrawala berpikir dan memberikan gambaran tentang proses formulasi Kebijakan Samisake.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini penulis mengkaji proses formulasi kebijakan publik Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu, khususnya menyangkut aktor dan konflik yang terjadi dalam proses formulasi kebijakan publik dari sudut domain pemerintah (eksekutif).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun desain penelitiannya adalah sebagai berikut: Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara komperhensif tentang formulasi Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu berdasarkan dua aspek, yaitu: proses perumusan Dana Bergulir Samisake di



Kota Bengkulu oleh Tim Penyusun (Eksekutif) dan Keterlibatan (partisipasi) masyarakat, aktor, dan stakeholders pada proses negosiasi dan formulasi kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.. Aspek Penelitian adalah Proses Formulasi dari Kebijakan Samisake. Teknik Pengumpulan Data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan Penelitian adalah Para pejabat yang terdiri dari: Tim Penyusun Program Dana Bergulir Samisake dan Kepala Dinas/ Lembaga Teknis Daerah/ Kepala Unit Kerja, sebagian camat, dan Lurah di Kota Bengkulu. Sebagian warga masyarakat yang terlibat dalam perumusan Program Dana Bergulir Samisake. Teknik Analisis Data menggunakan Reduksi Data, Penyajian data, Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Informan

Dalam pelaksanaan penelitian, untuk mendapatkan data primer terkait proses formulasi kebijakan publik Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu, peneliti mengambil informasi dari informan penelitian yang berjumlah 7 orang. 7 informan tersebut 1 orang berusia 21-30 tahun, 3 orang berusia 31-40 tahun, dan 3 orang berusia 41-50 tahun. Selanjutnya terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pendidikannya adalah SMA sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 3 orang, dan S3 sebanyak 1 orang.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan purposive sampling dimana mereka yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar memahami dan ikut terlibat secara langsung dalam proses formulasi kebijakan publik Program Dana

Bergulir Samisake di Kota Bengkulu sehingga data yang didapatkan merupakan data dan fakta yang terbukti kuat.

### Proses Perumusan Kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu Perumusan Masalah Kebijakan

Program dana bergulir samisake merupakan terobosan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di Kota Bengkulu. Karena berdasarkan pengamatan dengan turun langsung ke masyarakat masalah pengangguran dan kemiskinanlah yang paling mendesak untuk segera diatasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah penduduk miskin Kota Bengkulu berdasarkan hasil PPLS Tahun 2011 sebesar 74.646 jiwa, dan angka pengangguran berdasarkan data dari BPS Kota Bengkulu sebesar 17.545 jiwa. Akan tetapi, dalam perjalanannya untuk melaksanakan kegiatan ini tidak serta merta dapat segera dilaksanakan. Diperlukan suatu proses untuk mencari mekanisme dan instrumen yang paling tepat sebagai dasar pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak berbenturan baik secara hukum maupun secara teknis.

Dalam penyusunan mekanisme dan instrumen untuk mencari model yang paling tepat pengelolaan samisake telah dilakukan beberapa kali pertemuan, diskusi-diskusi dan tukar pendapat dengan Pihak Akademisi, FKPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, SKPD Teknis, LSM guna memperoleh masukan-masukan, pendapat, pengalaman bagaimana formulasi yang tepat dalam rangka pelaksanaan Samisake.

### Isu Kebijakan dan Agenda Kebijakan

Berkaitan dengan Program Dana Bergulir Samisake yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, identifikasi awal yang penulis lakukan untuk menjawab permasalahan ini yakni dengan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan kelompok

sasaran terkait dengan Program Dana Bergulir Samisake.

Hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan karena tanpa mengetahui dengan benar apa yang menjadi kebutuhan dari kelompok sasaran secara tepat kebijakan yang dibuat dan dimplementasikan tidak akan menjawab dan menyelesaikan inti dari permasalahan publik. Untuk melakukan penilaian terhadap subaspek ini maka proses identifikasi dilakukan dengan melihat peta masyarakat dan diversifikasi kelompok usaha yang ada di Kota Bengkulu.

Selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan kelompok sasaran (dalam hal ini masyarakat Kota Bengkulu) yang menjadi target dari kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Bengkulu, peneliti melakukan penggalian informasi dengan melaksanakan wawancara kepada BAPPEDA Kota Bengkulu sebagai penanggungjawab desain program/ perumus dari Kebijakan.

Berdasarkan uraian petikan wawancara di atas, dapat kita maknai bahwa isu kemiskinan tidak lepas dari kebutuhan akan lapangan pekerjaan dan akses akan permodalan serta keterampilan penunjang agar masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk melawan rotasi rantai kemiskinan. Pemerintah juga diharapkan dapat merumuskan strategi yang tepat, bukan hanya dalam merumuskan program pengentasan permasalahan kemiskinan yang ada, namun yang tidak kalah pentingnya adalah mengidentifikasi siapa target group yang akan menjadi sasaran program. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan, agar program yang di desain tidak menjadi bias dalam tataran implementasinya.

### **Pemilihan Alternatif Kebijakan**

Dalam tahap permulaan suatu formulasi banyak alternatif dapat diterima. Namun demikian, setelah diskusi dan evaluasi, alternatif kebijakan yang ada

akan berkurang. Di sini para formulator menyiapkan suatu usulan pasti tentang alternatif kebijakan yang akan diambil, mereka harus memikirkan sikap, aturan, dan tuntutan yang membatasi tingkah laku dari para legitimator.

Berkaitan dengan alternatif kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk menjawab kebutuhan kelompok sasaran yang telah teridentifikasi seperti termuat dalam isu dan agenda kebijakan yakni kebutuhan akan kemudahan akses berusaha dan modal serta keterampilan pendukung bagi masyarakat miskin. Hasil identifikasi terkait dengan masyarakat miskin yang ada di Kota Bengkulu sebagai target group/ sasaran kebijakan mengisyaratkan bahwa dalam tataran praktis, aspek peningkatan modal dan keterampilan penunjang untuk mengembangkan diri menjadi kebutuhan utama yang diharapkan oleh masyarakat miskin di Kota Bengkulu.

Dalam dokumen perjalanan Samisake disebutkan bahwa proses Penentuan alternatif pilihan program yang menjadi pilihan program terbaik oleh Pemerintah Kota Bengkulu dari hasil public hearing yang dilaksanakan untuk menangkap issue public terkait dengan kebutuhan masyarakat miskin yang ada dan berdasarkan pada permasalahan didapatkan permasalahan kemiskinan Kota Bengkulu berada di angka  $\pm 63.000$  dan pengangguran diangka  $\pm 70.000$ .

Maka Pemerintah Kota Bengkulu mengembangkan kebijakan ekonomi lokal dengan konsep Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake), yang melibatkan setiap individu dapat memanfaatkan dan mengembangkan ekonomi lokal dan

berdampak pada peningkatan pendapatan dan penambahan lapangan kerja baru. Beranjak dari keadaan inilah maka tercetus pemikiran akan adanya suatu program pengentasan kemiskinan yang pro rakyat dengan nama Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake).

Terkait dengan rangkaian kegiatan dalam pemilihan alternatif program sebagaimana dalam pandangan Jones, (1996: 161) secara bertahap dalam menentukan alternatif kebijakan melalui beberapa cara yaitu: (1) identifikasi alternatif terhadap problem yang hampir sama atau mirip; (2) mendefinisikan dan merumuskan alternatif; (3) menilai alternatif, agar jelas alternatif mana yang lebih menguntungkan, dan (4) memilih alternatif yang memuaskan atau paling mungkin dilakukan.

Dari keseluruhan subaspek yang telah dijabarkan terkait dengan proses formulasi kebijakan dapat kita identifikasi bahwa perumusan masalah kebijakan dalam dimensi agenda setting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam menghadapi tuntutan masyarakat (demand/claims) akan adanya kemudahan dalam berusaha yang meliputi modal, keterampilan, dan aspek pemasaran prodak usaha, yang diidentifikasi melalui proses public hearing.

Selanjutnya, berkaitan dengan alternatif kebijakan yakni dengan mengimplementasikan kebijakan dana bergulir samisake dengan menggunakan model UPTD sebagai rancangan awal implementasi program sampai terbentuknya BLUD. Adapun penilaian terhadap penilaian model tersebut belum memenuhi standar kriteria yang terdiri dari 4 kriteria yakni; (a) segi kelayakan

teknis (b) Kemungkinan ekonomi dan finansial (c) kelayakan secara politik, dan (d) dari segi kelayakan administratif.

### **Penetapan Kebijakan**

Setelah melalui pembahasan, diskusi, konflik, dan bargaining yang memakan waktu cukup panjang (kurang lebih delapan bulan), akhirnya tuntutan masyarakat tentang kemiskinan dan ketersediaan lapangan pekerjaan sebagaimana termuat dalam issue dan agenda kebijakan dapat ditetapkan sebuah kebijakan publik.

Nama kebijakan publik tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu, dimana dalam Peraturan daerah tersebut ditetapkan bahwa pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilaksanakan oleh UPTD pada Dinas. UPTD tersebut berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan dalam pengelolaan Dana Bergulir Samisake bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap kelurahan.

Kemudian terkait dengan realisasi Perda tersebut diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Perwal Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Adanya rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bengkulu dalam proses Perencanaan Program Dana Bergulir Samisake dalam dokumen RPJMD dapat diartikan pula sebagai proses kronologis penyusunan RPJMD. Proses ini dimulai dengan tahap perumusan masalah sebagai titik awal (starting point) sampai dengan ditetapkannya dokumen RPJMD menjadi produk hukum yang bersifat mengikat (tahap legislasi).

Dari proses legislasi inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan tentang Dana Bergulir Samisake yang di dalamnya memuat secara komperhensif tentang mekanisme pengguliran dana bergulir kepada masyarakat di Kota Bengkulu.

### **Interaksi Antar-Aktor Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu**

Aktor kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting. Actor kebijakan sangat berperan dalam perumusan berbagai alternatif, sampai dengan menentukan alternatif kebijakan yang dipilih. Partisipasi masyarakat sangat berperan dalam mendorong isu kebijakan kedalam agenda kebijakan, guna ditindaklanjuti melalui penetapan kebijakan.

Dalam penetapan kebijakan publik Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu ini, aktor penting yang terlibat Tim Eksekutif pengkaji dan pembahas Raperda Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu (Sekretaris Daerah, BAPPEDA, DPPKA, UPTD, LKM, Bagian Hukum, dan Camat). Sedangkan aktor dari masyarakat diwakili antara lain oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, LSM/NGO (kedua organisasi ini dalam setiap orasinya selalu menyuarakan kepentingan rakyat). Di samping itu, terdapat juga akademisi yang sangat berperan dalam proses perumusan kebijakan, yaitu dari Universitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Para aktor kebijakan ini selanjutnya berdiskusi dan berinteraksi untuk menemukan solusi atas masalah publik Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.

Interaksi antaraktor ini, diwarnai oleh perdebatan, adu argumnetasi, dan konflik, di mana masing-masing aktor berpendapat bahwa alternatif dan pendapatnyalah yang paling benar dalam menyelesaikan persoalan implementasi dana bergulir di lapangan.

Interaksi antaraktor ini pada akhirnya menghasilkan kebijakan publik Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu yang mampu memuaskan semua pihak. Artinya interaksi tersebut mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang pada awalnya berbeda, melalui proses bargaining.

Proses bergainning ini dalam proses perumusan kebijakan publik bertujuan untuk memperoleh win-win solution. Artinya kepentingan semua pihak dapat terakomodasi dan mampu menghasilkan sebuah kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat kelompok sasaran. Demikian pula sebagai proses politik, perumusan kebijakan publik pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dan kepentingan terhadap suatu kebijakan, guna menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian di muka menunjukkan masalah kebijakan dan isu kebijakan terkait dengan kebutuhan yang menjadi dambaan masyarakat Kota Bengkulu yakni akan adanya kemudahan akses untuk keluar dari kondisi kemiskinan melalui permodalan yang mudah dan bantuan keterampilan penunjang melalui pendekatan public hearing.

Di sini nampak bahwa di era demokrasi sekarang ini, masyarakat semakin kritis



dalam menyikapi setiap masalah publik. Dominasi pemerintah dalam insiatif kebijakan seperti yang terjadi selama ini, nampaknya telah bergeser kepada masyarakat.

Di sini peran masyarakat sangat besar dalam mempengaruhi pemerintah dan ini merupakan salah satu ciri dari negara demokratis. Pada saat ini hubungan antara demokrasi dan kebijakan publik menjadi sangat penting. Kebijakan publik yang lahir dalam suasana demokrasi, dimana keterlibatan antaraktor kebijakan sangat tinggi dan masyarakat berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, akan mampu mengakomodasikan kepentingan publik.

Kepentingan publik yang dimaksud di sini merupakan proses tarik-menarik dari berbagai kepentingan di masyarakat, yang kemudian dapat menjelma menjadi opini publik (Putra, 2001: 23 – 24). Isu kebijakan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu pada awalnya berasal dari masyarakat tentang isu kemiskinan dan kebutuhan akan lapangan kerja, yang kemudian menjadi opini publik yang direspon oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.

Dalam penetapan kebijakan, yaitu penetapan Raperda Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu, pihak legislatif dan stakeholders yang lain bersepakat bahwa dengan ditetapkannya Raperda Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu ini merupakan bukti kemenangan rakyat dan semua pihak yang terlibat dalam penggodokan Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu.

Mereka juga bersepakat ini adalah bukti demokrasi di Kota Bengkulu. Pendapat tersebut disampaikan oleh Walikota

Bengkulu ketika menetapkan Raperda Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu ini untuk diajukan dan dibahas bersama dengan Legislatif (dalam hal ini DPRD Kota Bengkulu).

## REFERENSI

- Alemina, Ema. Dr. Ir. MP, dkk. 2012. Pemetaan Kebijakan Pro Rakyat Miskin di Provinsi Aceh 2007-2011. Bappeda Aceh dan Unicef Indonesia. Banda Aceh.
- Anderson, James E. 1969. Public Policy Making. 2nd ed. Holt, Rinehart and Winston. New York.
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. 2016. Kota Bengkulu Dalam Angka 2016. BPS Kota Bengkulu., Kota Bengkulu.
- Bappeda Kota Bengkulu. 2012. Buku Perjalanan Samisake. Bappeda Kota Bengkulu, Kota Bengkulu.
- Blair, George S. 1986. Government at the Grass Roots. Free Press, New York.
- Chandler Ralph C. dan Jack C. Plano. 1982. The Public Administration Dictionary. John Wiley and Sons. Inc, New York.
- Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. Alih Bahasa Susetawan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Alih Bahasa Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Hervanto Hadna, Erwan Agus Purwanto,

Penyunting Muhadjir  
Darwin. Edisi Kedua. Gadjah  
Mada University Press,  
Yogyakarta.

Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall Inc, New Jersey.

Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Gaventa, John dan Camilo Valderama. 2001. *Partisipasi, Kewargaan, dan Pemerintah Daerah, sebagai pengantar buku Mewujudan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, The British Council dan New Economics Foundation.

Hikam, Muhammad A.S. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES, Jakarta.

Islami, Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Penerjemah Ricky Istamto, Editor Nashir Budiman. CV. Rajawali Press, Jakarta.

Lindblom, Charles E. 1984. *Proses Penetapan Kebijaksanaan*. Alih Bahasa Ardian Syamsudin. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Mas'ud, Mohtar. 1998. *Politik, Biokrasi, dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mawardi, Sulton dan Sudarno Sumarto. 2003. *Kebijakan Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus :*

Pro- poor Budgeting). Lembaga Penelitian SMERU

Milles M.B., dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

Nagel, Stuart. 1984. *Public Policy: Goals, Means, and Methods*. St. Martin's Press, New York.

Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing Inc, Cambridge.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dana Bergulir Samisake dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Putra, Fadilah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Nelson Hull Publisher, Chicago.

Steifel, M dan Wolf, M. 1994. *A Voice for the Exuded: Popular*

Participation in Development:  
Utopia or Necessity? Zed Books.  
London.

Sugiyono. 2001. Metode Penelitian  
Administrasi, Alfabeta,  
Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis  
Kebijaksanaan Dari Formulasi ke  
Implementasi Kebijakan  
Negara. Bumi Aksara, Jakarta.

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik  
Proses dan Analisis. CV.  
Intermedia. Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses  
Kebijakan Publik. Media  
Presindo, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses  
Kebijakan Publik. Media  
Presindo, Yogyakarta.

Website: <http://www.bengkulu.tv.co.id/>  
<http://www.bengkuluekspress.com/>  
<http://www.bengkulukota.go.id/>  
<http://www.bps.go.id>  
<http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/index>  
[/http://bappeda.acehprov.go.id](http://bappeda.acehprov.go.id)  
<http://bappeda.jambiprov.go.id/>